

**PELUANG DAN HAMBATAN PEREMPUAN DALAM
KEPEMIMPINAN DI NAGARI
(Studi di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



OLEH :

**ZELFIRA JULITA
TM/NIM : 2007/89300**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2011

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

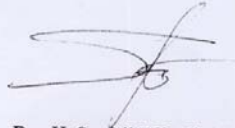
Judul : Peluang dan Hambatan Perempuan Dalam Kepemimpinan di Nagari
(Studi di kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya)

Nama : Zelfira Julita
TM/NIM : 2007/89300
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 November 2011

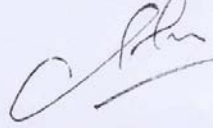
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. H. Syafnil Effendi, SH. MH
NIP. 19501101 1976 1 001

Pembimbing II



Drs. Yasril Yunus, M.Si
NIP. 19531017198211 1 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang


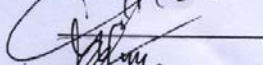
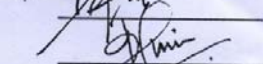
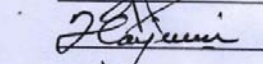
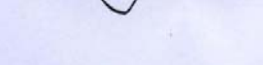
Pada hari Rabu Tanggal 22 November 2011 pukul 10.00 s/d 11.30 WIB

**Peluang dan Hambatan Perempuan dalam Kepemimpinan di Nagari
(Studi di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya)**

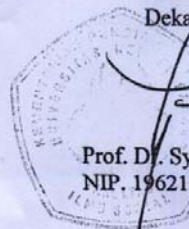
Nama : Zelfira Julita
TM/NIM : 2007/84645
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 November 2011

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. H. Syafnil Effendi, SH.MH	
Sekretaris	: Drs. Yasril Yunus, M. Si	
Anggota	: Drs. Muhandi Hasan, M. Pd.	
Anggota	: Drs. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M. Si	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Zelfira Julita
NIM/TM : 89300/2007
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul "*Peluang dan Hambatan Perempuan Dalam Kepemimpinan di Nagari (Studi di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya)*" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, November 2011

Yang menyatakan,




Zelfira Julita

ABSTRAK

ZELFIRA JULITA : 2007/89300. Peluang dan Hambatan Perempuan Dalam Kepemimpinan di Nagari (Studi di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya)

Penelitian ini dilatar belakangi karena minimnya kepemimpinan perempuan di nagari. Realitas sosial dan sejarah modern telah membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang mampu melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya menjadi monopoli kaum laki-laki. Perempuan memiliki peran serta kedudukan yang sama dengan laki-laki. Tapi tidak mudah bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, banyak hambatan yang ditemui oleh perempuan, namun dibalik semua itu terdapat peluang-peluang untuk menjadi pemimpin. Maka penelitian ini mengkaji apa saja yang menjadi peluang dan hambatan bagi perempuan dalam kepemimpinan nagari. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi peluang dan hambatan bagi perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif. Informan penelitian terdiri dari Cadiak Pandai, Alim Ulama, Penghulu, Ketua KAN, Walinagari, Bamus, Sekretaris Bamus, Ketua LPMN, Anggota LPMN, Ketua PKK, Anggota PKK dan Bundo Kanduang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya dilakukan teknik analisa keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik trigulasi sumber. Teknik analisis data yaitu dengan cara seleksi dan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi peluang dan kekuatan perempuan dalam kepemimpinan di nagari yaitu: (1) Peraturan Daerah yang tidak melarang pencalonan perempuan untuk menjadi pemimpin di nagari, (2) Kebebasan yang diberikan oleh kaum laki-laki kepada perempuan. (3) Kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. (4) Tingkat pendidikan yang tinggi. (5) Adanya sifat kelembutan dan jiwa keibuan. Sedangkan yang menjadi hambatan serta tantangannya adalah: (1) Pandangan Adat Minangkabau dan Agama Islam. (2) Beban ganda yang dipikul oleh perempuan. (3) Kurangnya kesadaran perempuan untuk mau tampil di masyarakat. (4) Masih banyak perempuan yang memiliki pendidikan yang rendah. (5) Masih kurangnya sosialisasi perempuan dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peluang dan Hambatan Perempuan Dalam Kepemimpinan Nagari (Studi di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya)”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar , M.Pd, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua dan Ibu Dra.Hj.Aina sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Syafnil Effendi, SH.MH Selaku Pembimbing I, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing, akhirnya Penulis dapat juga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh rasa sabar mendengar keluhan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Muhardi Hasan, M.Pd, Bapak Drs. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D beserta Bapak Drs. Karjuni DT. Maini, M.Si selaku anggota tim penguji,yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Estika Sari, SH selaku Penasehat Akademis, yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Informan yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian
8. Bapak Wali Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian
9. Teristimewa kedua orang tua atas do'a dan semangat yang diberikan.
10. Kepada kedua adik dan para sepupuku yang selalu memberikan dukungan.
11. Semua rekan-rekan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang , Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah, pembatasan dan Perumusan masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORITIS	
1. Teori Peluang.....	8
2. Teori Hambatan	12
3. Aspek Kepemimpinan	
a. Syarat-syarat Kepemimpinan	13
b. Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik.....	14
4. Kepemimpinan Perempuan	
a. Kelebihan Kepemimpinan Perempuan.....	15
b. kelemahan Kepemimpinan Perempuan.....	18
5. kedudukan Perempuan dalam Suku Minangkabau	
a. Kedudukan dan Peranan Perempuan	
Dalam Adat Minangkabau	21

b. pemerintahan perempuan dan Desa	22
6. Nagari dan Pemerintahan nagari	
a. Pengertian Nagari	22
b. Sistem pemerintahan Nagari Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2007	23
c. Pemerintahan Nagari Berdasarkan Perda Agama No. 12 Tahun 2007	26
B. KERANGKA KONSEPTUAL	29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan Penelitian	32
D. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	33
E. Alat Pengumpulan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	41
B. Temuan Khusus	44
C. Pembahasan	65

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis Data, Sumber Data, Teknik dan Alat Pengumpul Data	37
2. Nama-nama Perempuan Yang Duduk di Bangku Pemerintahan	60
3. Pendidikan Penduduk Nagari Koto Gadang	71

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Struktur Organisasi KAN dan BAMUS	4
2. Kerangka Konseptual	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Format wawancara
2. Izin Penelitian dari Fakultas
3. Izin Penelitian dari Kesbangpol dan Limas Kabupaten Agam
4. Izin Penelitian dari Kantor Camat Tanjung Raya
5. Izin Penelitian dari Kantor Walinagari Koto Gadang
6. Surat Keterangan selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, banyak kaum perempuan yang mempertanyakan hak-hak mereka dalam hal kepemimpinan. Sehingga banyak kaum perempuan yang berusaha untuk mendapatkan kembali suara mereka di tengah masyarakat atas dasar klaim bahwa juga mampu memimpin di masyarakat.

Lois (2007:5) mengemukakan bahwa “eksekutif perempuan mempunyai kecenderungan alami yang besar untuk melakukan beberapa pekerjaan”. Berdasarkan pendapat Lois tersebut dapat diketahui bahwa perempuan memiliki kelebihan dalam kepemimpinannya, akan tetapi peran perempuan dalam pemerintahan seringkali mendapat persepsi tajam dari masyarakat baik positif maupun negatif. Persepsi masyarakat yang menyangkut kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan yang sering dibicarakan adalah persoalan gender.

Dapat kita lihat, tidak banyak perempuan yang menjadi pemimpin atau yang duduk pada jabatan yang strategis di lembaga pemerintahan. Tapi faktanya pada masa pergerakan nasional banyak tokoh-tokoh pemimpin perempuan seperti Rasuna Said yang berasal dari Maninjau. Seorang puteri terbaik bangsa yang tidak hanya sekedar memperjuangkan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pergerakannya dimulai dari emansipasi sampai ke agama, pendidikan, pers, bahkan politik. (Baluwanti, “Relief

Perjuangan Bangsa Indonesia”. Jakarta; Jayakarta Agung)

Sumber : <http://urang-minang.blogspot.com/2007/12/rasuna-said.html> diakses tgl 21/01/20 pada pukul 11.22 WIB)

Selain itu masih ada pemimpin perempuan dari daerah ini yaitu Sitti Manggopoh yang berjuang bersama kaum lelaki tanpa mengenal gender. Begitu juga di masa kemerdekaan, salah seorang presiden kita yang juga perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarno Puteri. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa perempuan mampu menjadi seorang pemimpin, mengapa di nagari hal tersebut tidak bisa.

Indonesia sebagai Negara demokratis dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak mengenal istilah paham diskriminasi gender, seperti yang di cantumkan secara tegas dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tidak ditemukan aturan hukum yang melarang perempuan ikut serta dan mengambil peran dalam pemerintahan seperti halnya laki-laki. Begitu juga tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah nagari. Oleh karena itu, rekomendasi yang menolak kehadiran pemimpin perempuan sangat bertolak belakang dengan iklim nasional bahkan internasional untuk yang gencar memperjuangkan harkat dan martabat perempuan untuk meraih kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW*) yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.

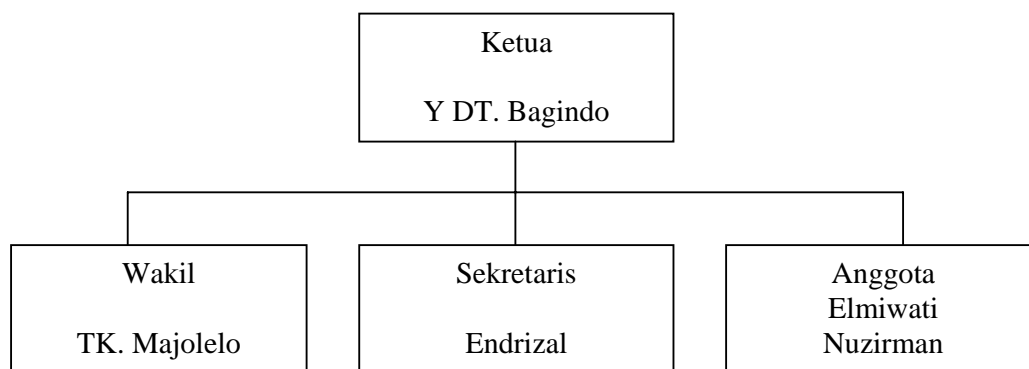
Di dalam naskah tersebut antara lain dicantumkan:

“Meningat bahwa salah satu tujuan PBB seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 dan 55 dalam piagam PBB adalah untuk meningkatkan penghargaan sedunia sebagai hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin
Meningat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang melanggar asas persamaan hak dan penghormatan pada martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan, persamaan hak dengan pria dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya di negaranya, merintangai pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta menyulitkan perkembangan kemampuan wanita dalam pelayanan terhadap negaranya dan kemanusiaan....”

Dalam pandangannya, perempuan diidentik dengan sosok yang lemah, halus dan emosional. Pandangan ini telah memosisikan perempuan sebagai makhluk yang seolah-olah harus dilindungi dan senantiasa bergantung pada kaum laki-laki. Akibatnya jarang sekali perempuan untuk bisa tampil menjadi seorang pemimpin, karena mereka tersisihkan oleh dominasi laki-laki. Sejalan dengan gerakan emansipasi perempuan dan gerakan kesetaraan gender yang intinya berusaha menuntut adanya persamaan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, maka setahap demi setahap telah terjadi pergeseran dalam mempersepsi tentang sosok perempuan. Mereka tidak dipandang lagi sebagai sosok yang lemah yang selalu berada pada garis belakang. (Akmal Sudrajat, “kepemimpinan perempuan” di acces tgl 15/10/2010, www.manajemenpendidikan.com).

Namun dalam kenyataannya, semua ini tidak terlihat di kenagarian Koto Gadang. Menurut keterangan Ibu Elvi, yang merupakan salah seorang warga di Kenagarian Koto Gadang tersebut, banyak perempuan yang mengerti tentang pemerintahan dan mampu menjadi seorang pemimpin, tetapi mereka tercekak oleh anggapan bahwa perempuan tidak pantas jadi pemimpin, karena menyalahi kodratnya sebagai perempuan, dan tidak mampu menjadi seorang pemimpin. Perempuan hanya cukup menjadi pekerja di rumah saja.

Minimnya kepemimpinan perempuan di kenagarian ini dapat kita lihat dari susunan organisasi seperti BAMUS yang tergambar di bawah ini:



Sumber: Kantor Wali Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya periode 2009-2014

Dari data di atas dapat kita lihat gambaran bahwa sangat minimnya perempuan yang tampil sebagai pemimpin di kenagarian ini. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu Elmiwati, Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan selain itu rendahnya tingkat pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki.

Realitas sosial dan sejarah modern telah membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap

hanya menjadi monopoli kaum laki-laki. Seperti adanya sejumlah perempuan yang menjadi kepala pemerintahan, ketua partai politik, bahkan menjadi pemimpin di sebuah nagari. Seiring dengan bergulirnya reformasi politik, di Indonesia telah membawa angin segar bagi pelaksanaan HAM, termasuk hak politik, reformasi politik. Reformasi politik ini telah membawa perubahan pada wanita dimana semakin menyadari akan hak mereka dan memperjuangkan hak tersebut dengan berbagai cara baik melalui tulisan, seminar, maupun melalui demonstrasi dan peraturan perundang undangan. (Lenny I.F.W. Simantupang."kepemimpinan perempuan dalam birokrasi". Studi deskriptif kantor pemerintahan provinsi Sumut, medan. Di acces tgl 15/10/2010)

Dan ini secara jelas menunjukkan bahwa perempuan mampu, perempuan bisa diandalkan, dan perempuan juga mempunyai peran serta kedudukan yang sama dengan laki-laki, maka hal ini tidak bisa kita pungkiri.

Kalau kita lihat lagi, sebenarnya perempuan hanya merupakan kultural masa lampau, yakni memposisikan perempuan semata-mata sebagai subordinat yang mana memandang perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, berakibat munculnya sikap yang menepatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. (Mansour Fakh, 1996:15)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang apa saja yang menjadi peluang dan hambatan perempuan dalam memimpin sebuah nagari, yang penulis berikan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Peluang dan Hambatan Perempuan Dalam**

Kepemimpinan Nagari” (Studi Kasus di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya)

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Faktor yang menyebabkan sangat minimnya kepemimpinan perempuan dalam nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya
- b. Apa saja yang menjadi peluang dan hambatan bagi perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan kepemimpinan perempuan tersebut pada pemerintahan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalahnya adalah peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diteliti adalah apa saja peluang dan hambatan bagi perempuan dalam

kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi peluang dan hambatan bagi perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan tentang pemerintahan nagari khususnya dalam mata kuliah Sispemda.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna memberikan motivasi sebagai perempuan menjadi mitra sejajar dengan laki-laki untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam kepemimpinan di nagari. Selanjutnya dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dengan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perempuan dalam kepemimpinannya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Teori Peluang

Di dalam kepemimpinan baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki memiliki tujuan yang sama hanya saja yang berbeda dilihat dari segi fisik semata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kimbal Young (dalam Kartono. 1983 : 40) bahwa,

Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian yang khusus dan tepat.

Perempuan perlu mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjadi seorang pemimpin sesuai dengan apa yang dicita-citakan mereka. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Suryo Hadi Projo (1987 : 237) yaitu,

Kemampuan perempuan memang makin kelihatan dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh wanita seperti yang dikerjakan oleh pria. Dan kualitas pekerjaannya tidak lebih rendah dari pria. Kecuali kalau pekerjaan itu menuntut tenaga fisik yang besar. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih tepat dilakukan oleh wanita karena lebih menuntut sifat-sifat kewanitaannya.

Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW*) yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Di dalam naskah tersebut antara lain dicantumkan:

“Meningat bahwa salah satu tujuan PBB seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 dan 55 dalam piagam PBB adalah untuk meningkatkan penghargaan sedunia sebagai hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang melanggar asas persamaan hak dan penghormatan pada martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan, persamaan hak dengan pria dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya di negaranya, merintangi pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta menyulitkan perkembangan kemampuan wanita dalam pelayanan terhadap negaranya dan kemanusiaan....”

Demikian pula UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46, tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin keterwakilan perempuan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan seluruh kebijakan dan Program Pembangunan Nasional dirancang dengan perspektif gender.

Dengan demikian, secara yuridis, kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki, baik di bidang hukum, politik, sosial maupun ekonomi, dijamin setingkat dalam konstitusi negara Indonesia. (Luki

Sandra Ameliah. <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/jender-and-politik/288-antisipasi-perjuangan-perempuan-dalam-uu-pemilu>)

Selain itu dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi:

1. Pasal 8 bagian D

“menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”

2. Pasal 15 bagian D

“surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Selain itu, secara tegas dicantumkan di dalam UUD 1945 tentang adanya persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, antara lain dalam:

3. Pasal 27 ayat (1) UUD 45

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak ada kecualinya.

4. Pasal 27 ayat (2) UUD 45

Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945 tersebut merupakan asas umum yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, di dalamnya dijabarkan asas persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan diberbagai bidang, antara lain pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hokum, politik, dan sebagainya, dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang non diskriminatif. Iromi (2000:239) mengatakan, sejak tahun 1993 telah memberikan arahan yang jelas tentang peranan perempuan tentang dalam pembangunan bangsa antara lain sebagai berikut:

“Perempuan sebagai warga Negara maupun sumber daya insan pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan disegala bidang. Pembinaan perempuan sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia serta pengembangan anak remaja dan pemuda dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seterusnya.”

Untuk mencapai kesetaraan dan menghapuskan ketidakadilan dan pendiskriminasian terhadap perempuan untuk memperoleh dan menjaga bagian dan ikut berkecimpung dalam birokrasi pemerintahan. Pemerintah telah menjamin adanya kebebasan dalam persamaan hak dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai warga negara. Dalam UUD 1945 pasal

28 a s/d 28 j, dalam konteks yang sangat luas, diskriminasi berdasarkan perspektif apapun menjadi sangat tabu dilaksanakan termasuk diskriminasi gender dalam dunia politik.

2. Teori Hambatan

Untuk menjadi seorang pemimpin, tidak mudah dicapai oleh seorang perempuan. Tidak jarang perempuan menghadapi hambatan-hambatan untuk menjadi seorang pemimpin. Ibrahim (1991:16) menguraikan beberapa hambatan dari kepemimpinan perempuan yaitu:

Pertama, hambatan fisik. Perempuan, katanya. Dibeberatkan oleh tugas “kontrak” untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusan ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan

Kedua, hambatan teologis. Untuk waktu yang lama, perempuan dipandang sebagai makhluk yang diciptakan untuk lelaki. Termasuk untuk mendampingi mereka, menghiburnya, dan mengurus keperluannya. Perempuan menurut cerita teologis seperti ini, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Cerita ini telah jauh merasuk dalam benak banyak orang. Dan secara psikologis menjadi salah satu penghambat perempuan untuk mengambil peran yang berarti.

Ketiga, hambatan sosial budaya. Pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa dan menerima keadaan. Sebaliknya laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat, cerdas, aktif, mandiri, dan sebagainya. Pandangan ini yang membuat laki-laki secara sosio-kultural lebih tinggi derajatnya dari perempuan.

Keempat, hambatan sikap padang. Hambatan ini bisa dimunculkan antara tugas perempuan dan laki-laki. Perempuan dinilai sebagai makhluk rumah, sedangkan laki-laki sebagai makhluk luar rumah. Pandangan seperti ini bisa jadi membuat

perempuan merasa tidak aman keluar rumah, dan visi bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan tidak layak di urus oleh laki-laki.

Kelima, hambatan historis. Kurangnya nama perempuan dalam sejarah di masa lalu bisa dipakai membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkarir layaknya seorang laki-laki.

3. Aspek-aspek Kepemimpinan

Aspek-aspek kepemimpinan yang dilihat pada penelitian ini adalah:

a. Syarat-syarat Kepemimpinan

Syarat-syarat kepemimpinan sangat penting untuk diperhatikan, karena merupakan landasan untuk melakukan aktifitas-aktifitas seseorang pemimpin. Jika syarat-syarat menjadi pemimpin terpenuhi, maka akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dalam bukunya Kartono (Permadi, 1996:15) mengatakan bahwa, pesyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan 3 hal penting, yaitu: (1) kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberi kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. (3) kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Stogdil (Permadi, 1996: 17-15) mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu: (1) kapasitas, yaitu kecerdasan, kemampuan berbicara, keaslian, dan kemampuan menilai. (2) prestasi yaitu gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan olah raga dan atletik, dan lain-lain. (3) tanggung jawab, yaitu mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, sosiabiliti tinggi, mampu mengurus atau kerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa konyol. (5) status, yaitu memiliki kedudukan spesial ekonomi yang cukup tinggi, populer dan tenar.

b. Ciri-ciri pemimpin yang baik

Menurut Max Well (Pasolong 2008:12), memberikan rujukan untuk menjadi pemimpin yang baik harus memiliki ciri-ciri: (1) pemimpin yang baik harus mampu menciptakan lingkungan yang tepat. Cara paling baik untuk memiliki loyalitas personal adalah dengan memperhatikan kepada mereka dengan kata-kata dan perbuatan. (2) pemimpin yang baik mampu mengetahui kebutuhan dasar bawahannya. (3) mampu mengendalikan keuangan personalia, dan perencanaan. (4) mampu menghindari tujuh dosa yang mematkan: (a) berusaha untuk disukai bukan dihormati, (b) tidak meminta nasehat dan bantuan kepada orang lain, (c) mengesampingkan bakat pribadi dan menekan peraturan bukan keahlian, (d) tidak menjaga untuk dikritik, (e) tetap konstruktif, (f)

memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama, (g) tidak membuat setiap orang selalu mendapat informasi.

4. Kepemimpinan Perempuan

Mulai dari definisi kepemimpinan, syarat-syarat menjadi pemimpin, kepemimpinan yang baik, gaya kepemimpinan di atas yang menunjukkan bahwa pemimpin tidaklah harus seorang laki-laki. Jadi, dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan berhak dan bisa menjadi seorang pemimpin, apabila perempuan tersebut memang mempunyai kualitas yang bagus. Tapi sayangnya perempuan kebanyakan tidak bisa menjadi seorang pemimpin karena banyaknya hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, padahal perempuan mempunyai gaya tersendiri dalam memimpin.

a. Kelebihan kepemimpinan perempuan

Sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan Caliver (Roma Lisa, 2009) yaitu studi tentang perempuan, yang membuktikan bahwa perempuan dalam kepemimpinan yang komprehensif serta nilai-nilai positif lainnya. Tampak dengan ciri-ciri kepemimpinan perempuan sebagai berikut:

1. Kepiawaian dalam membujuk

Kepemimpinan perempuan lebih persuasif dibandingkan dengan laki-laki, perempuan memang terlahir sebagai pembujuk ulung.

Mungkin dikarenakan sifat keibuan yang melekat pada dirinya, sehingga dengan mudah membujuk orang melakukan hal yang ia inginkan.

2. Tidak termakan ego

Perempuan memiliki tingkat kekuatan ego yang lebih rendah dibanding laki-laki tidak bermuka tebal dan menghalalkan segala cara demi memuaskan ego pribadi. Perempuan lebih bisa mengendalikan diri ketimbang laki-laki, lebih bisa berpikiran jernih, karena kecenderungan perempuan menggunakan perasaannya dalam bertindak walaupun sebenarnya sewaktu-waktu bisa berbalik menjadi batu sandungan.

3. Pemain Tim

Perempuan terbiasa bekerja sama ketika menghadapi masalah, biasanya dengan melakukan sharing dan berusaha mencari penyelesaian bersama, karena perempuan lebih kompak dibanding laki-laki.

4. Memiliki kharisma

Kharisma yang dimiliki oleh seseorang perempuan tidak kalah dengan laki-laki, bahkan lebih mempunyai kejujuran, percaya diri serta kemampuan kuat untuk menyelesaikan tugas. Perempuan

lebih ulet ketimbang laki-laki karena dalam mengerjakan lebih sabar dan telaten.

5. Berani mengambil resiko.

Siapa bilang perempuan tidak berani mengambil resiko? Contohnya dalam hal pembelian barang bersifat kredit, sedangkan laki-laki akan berfikir panjang untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal manajemen keuangan perempuan memang lebih baik ketimbang laki-laki karena perempuan mampu mengolahnya dengan baik.

Menurut Lois (2007:177) perempuan memiliki senjata rahasia yang bisa dijadikan kelebihan kepemimpinannya jika perempuan tersebut:

1. Membangun persahabatan yang bertahan lama.
2. Mengumpulkan dan mengambil tindakan atas umpan balik yang membangun.
3. Menyelesaikan konflik dengan teman dan pasangan.
4. Menahan emosi dalam situasi yang bergejolak.
5. Dicari sebagai teman, orang kepercayaan, atau penasihat.

Divera Dicoksono (redaksi@warta egov.com,2007) juga mengemukakan “kelebihan” pemimpin perempuan sebagai berikut:

1. Memiliki sikap dan naluri dan kelembutan, ketekunan, kesabaran, ketelitian dan mudah bersimpati dengan lingkungan sekitarnya.
2. Mudah diterima oleh semua kalangan sehingga terkesan netral dimata semua pihak.
3. Umumnya lebih mengutamakan produktivitas dan hasil kinerja dibandingkan iklim politik.
4. Kemampuan diplomasi yang baik khususnya jika berhadapan dengan laki-laki.
5. Mengedepankan nilai kedamaian dan kemanusiaan dalam mengambil keputusan.

b. Kelemahan kepemimpinan perempuan

Selain banyak terdapat kelebihan kepemimpinan perempuan, juga terdapat banyak kekurangan sebagai berikut:

1. Perempuan kurang tegas dalam pengambilan keputusan ketimbang laki-laki .
2. Perempuan dalam menyelesaikan konflik cenderung lamban karena lebih mendahulukan perasaan dari pada pikiran.

3. Beban ganda yang dimiliki perempuan antara lain menjadi seorang ibu rumah tangga dan seorang pemimpin akan mempersulit perempuan karena membuat bingung mana yang akan didahulukan antara rumah tangga dan pekerjaan.
4. Laki-laki lebih disiplin dibandingkan perempuan.

Di jaman yang semakin maju dan canggih ini, kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan tidak lagi dibedakan statusnya. Wanita tidak kalah dengan pria. Meski berpeluang untuk tumbuh dan mengembangkan dirinya, namun banyak wanita yang merasa kurang percaya diri. Sebenarnya, banyak faktor yang menentukan berhasil tidaknya seseorang, entah wanita maupun pria. Antara lain, kemampuan memanfaatkan peluang, potensi dan nasihat dari yang lebih berpengalaman, kesabaran serta sikap mental dalam menekuni pencapaian suatu prestasi. Satu yang tidak kalah penting adalah bagaimana seseorang belajar dari kesalahan dan kelamahan yang ada pada dirinya.

Berikut ini kelemahan yang membuat wanita sulit berkembang, diantaranya:

1. Bersikap pasif

Wanita cenderung bersikap pasif. Mengapa? Padahal wanita dikatakan suka bersosialisasi. Dalam rapat organisasi atau suatu diskusi, wanita cenderung sulit mengungkapkan pendapatnya secara terbuka. Padahal mereka mempunyai pemikiran cemerlang

dan pandai menyusun kata-kata dengan baik. Sebenarnya, wanita sangat ingin mengemukakan ide-ide dan gagasannya hanya saja dihalangi oleh perasaan takut, takut apabila nantinya melakukan kesalahan. Dengan demikian, aspirasi mereka cenderung diabaikan.

2. Tidak ingin menonjol

Tidak sedikit wanita yang tidak ingin menonjolkan diri saat terlibat dalam tugas-tugas penting. Wanita cenderung meremehkan kemampuannya dalam mempelajari hal-hal baru. Mereka merasa ragu apakah bisa untuk menyelesaikan tugas itu. Kalau disertai tugas-tugas baru, jawaban yang biasanya keluar adalah “saya belum pernah melakukan tugas itu” padahal jawaban yang diharapkan adalah “saya akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya” yang dikatakan dengan penuh keyakinan.

3. Alergi teknologi

Wanita sekarang kurang memperhatikan perkembangan teknologi. Banyak wanita tidak menyadari bahwa teknologi dapat membantunya untuk berprestasi, meningkatkan kemampuan diri. Untuk menguasai teknologi, wanita tidak kalah dengan pria dan lebih dari itu jangan mau kalah dengan wanita.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan diri, seseorang terutama seorang wanita harus mampu membangun sikap positif. Sikap

positif tersebut terlihat melalui sikap optimis untuk berprestasi, terbuka untuk senantiasa mau bekerja sama, mengasah kemampuan, sikap tidak mudah menyerah, dan sikap positif lainnya yang bisa memacu datangnya keberhasilan dan kesuksesan. (Monica Melik <http://himansa.blogspot.com/2007/03/artikel.html> di akses tgl 23/12/2010)

5. Kedudukan Perempuan Dalam Suku Minangkabau

a. Kedudukan Dan Peranan Perempuan Dalam Adat

Minangkabau

Boestami, dkk (1992:85) mengatakan bahwa untuk mengerti sebaik-baiknya kedudukan perempuan dalam suatu kebudayaan tertentu adalah dengan mempelajari hubungan antara dua kelompok kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan.

Dalam bukunya “Kedudukan dan peranan perempuan dalam kebudayaan Minangkabau” *Boestami, dkk* (1992:85) mencoba mengartikan kedudukan perempuan di dalam maupun di luar keluarga dan rumah tangga adalah posisi anggota keluarga karena distribusi dan alokasi kekuasaan.

Dari kedua pemikiran itu adalah menarik untuk menyoroti peranan perempuan dalam kebudayaan suku bangsa Minangkabau. Melihat peranan dan pengaruh perempuan dalam keluarga, rumah tangga serta masyarakat yang lebih luas, yaitu:

- (1). Peranan perempuan di dalam dan di luar rumah gadang adalah rumah yang berhubungan erat dengan kebudayaan Minangkabau, sebagai suatu masyarakat yang matrilineal, yaitu dalam pola hubungan kekeluargaan.
- (2). Besarnya peranan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga dan sebaliknya serta sumbangnya terhadap kehidupan masyarakat desa dan kampung.

b. Pemerintahan Perempuan dan Desa

Boestami (1992:155) menyatakan, di dalam pemerintahan desa, kedudukan perempuan ditetapkan salah satu diantaranya dalam Seksi Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) yang dikoordinasikan oleh ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Pemerintahan, Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa. Masing-masing istri mereka secara fungsional langsung jadi ketua umum pergerakan PKK. Jadi kegiatan perempuan dalam mencapai sasarannya adalah: “ sikap dan perilaku hidup anggota keluarga sebagai insan Hamba Tuhan, warga negara dan warga masyarakat”, dilakukan melalui kegiatan di bawah koordinasi Tim Penggerak PKK di nagari.

6. Nagari dan Pemerintahan Nagari

a. Pengertian Nagari

Menurut Perda Propinsi Sumatera Barat nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari, nagari merupakan

kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.

b. Sistem Pemerintahan Nagari Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2007

Dalam Perda Propinsi Sumatera Barat nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari dahulunya merupakan wilayah administratif. Pemerintahan Nagari sekaligus menjadi wilayah hukum adat di Sumatera Barat. Pemerintahan tersebut bersifat otonom dan sangat demokratis. Tetapi selama lebih dari 17 tahun, pemerintahan nagari itu telah diganti menjadi pemerintahan desa yang bersifat sentralistik. Dalam masa yang berlaku, itu persis sejak 1 Agustus 1983 diterapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

pemerintahan desa di Sumatera Barat. Sejak itu, Pemerintahan Nagari dihapus dari kamus pemerintah.

Sejak diberlakukannya Perda Sumbar no. 9 Tahun 2000, kegiatan kembali kepada sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Dalam Penjelasan Umum angka 10. UU No.32 Tahun 2004 dipertegas lagi bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai pada akhirnya diberlakukan Perda No. 9 Tahun 2007, guna penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan efektif di nagari.

Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di nagari. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) pada undang-undang ini.

Dari hal di atas terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga pengaturan, bukan lembaga legislatif seperti

dimaksud oleh ajaran Trias Politica Montesque dan Perda Sumbar no. 2 Tahun 2007. Di dalam suasana hukum adat, sejak dulu tidak dikenal trias polotika tersebut. Dan masyarakat hukum adat dikenal lembaga permusyawaratan, baik langsung (referendum) maupun perwakilan (resresentif). Lembaga inilah yang membuat peraturan (legislasi), memilih pemimpin desa, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, serta menyelesaikan dan memutuskan sangketa jika ada pelanggaran peraturan (yudikasi).

Dalam Perda Sumbar No. 2 Tahun 2007 pasal 2, Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di nagari, dibentuk Pemerintahan Nagari yang terdiri dari Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari

Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Pada bagian Badan Permusyawaratan terdiri terdiri dari unsur Ninik Mamak / tokoh adat /kepala suku, Alim Ulama / Tokoh Agama, Cadiak Pandai /cendikiawan, Bundo Kandung /Tokoh Perempuan dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari bersangkutan dengan mempertimbangkan representasi Jorong yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

**c. Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007**

Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Daerah sebagai landasan hukum Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai diberlakukannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dengan prinsip demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Bahwa dalam menampung, menyalurkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Agam untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan falsafah adat alam Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Untuk itu dibuatlah Perda Agam No. 31 Tahun 2001, yang sekarang telah disempurnakan dalam Perda Agam no. 12 Tahun 2007, karena dianggap belum sepenuhnya menampung aspirasi masyarakat serta belum dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang efektif dan efisien.

Dalam Perda ini, Peraturan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Sedangkan Nagari disebutkan sebagai pertemuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau (adat basandi syara', syara' basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat salingka nagari. Pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah nagari merupakan Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari. Sedangkan Bamus adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah Nagari.

Dalam pasal (2) dalam Perda no. 12 tahun 2007 ini, juga dijelaskan tujuan dari pembentukan Pemerintahan Nagari yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Namun semua itu harus memenuhi syarat-syarat (pasal 3), yaitu diantaranya:

1. Jumlah penduduk 2.000 jiwa atau 400 KK atau lebih
2. Luas wilayah minimal 600 Ha
3. Wilayah kerja dapat dijangkau dan memiliki jaringan perhubungan antar jorong
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat
5. Memiliki potensi nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia
6. Memiliki batas nagari yang jelas
7. Adanya perbedaan struktur adat dalam satu nagari
8. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintahan Nagari terdiri dari Walinagari dan Perangkat Nagari. Sedangkan Perangkat Nagari ini terdiri dari Sekretaris Nagari dan perangkat nagari lainnya. Perangkat nagari lainnya tersebut berupa:

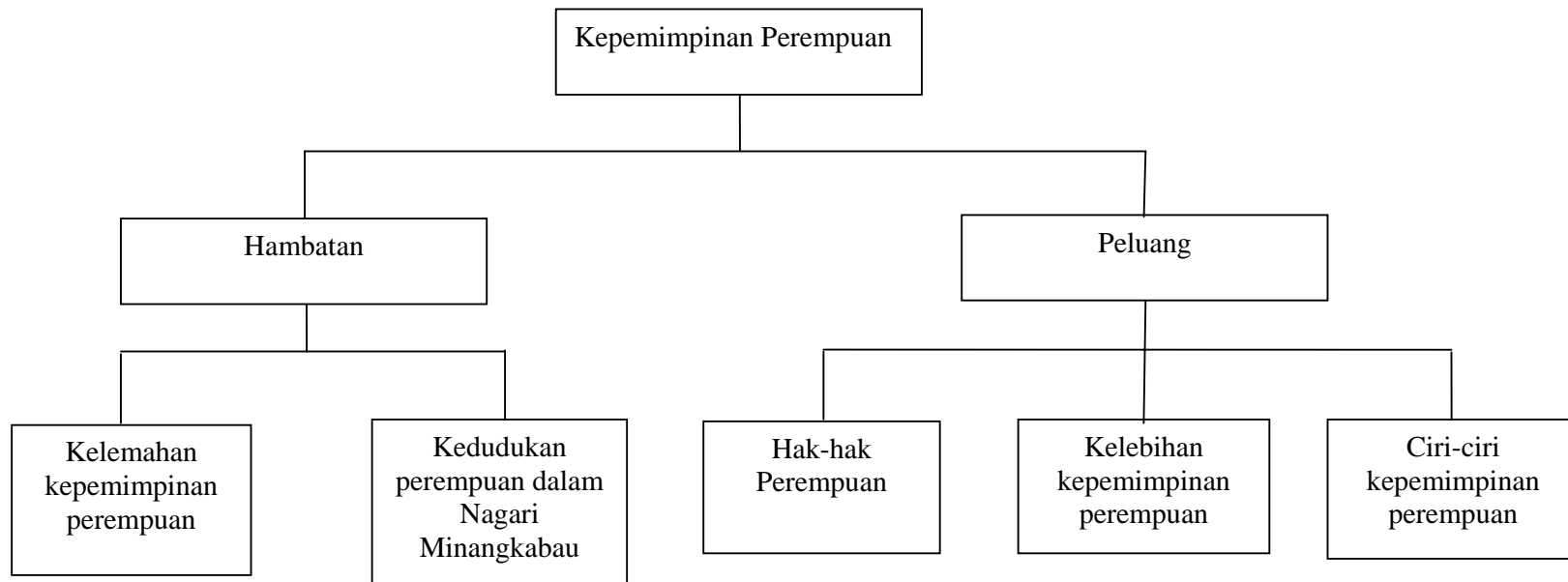
1. Kepala Urusan Pemerintahan
2. Kepala Urusan Pembangunan
3. Kepala urusan sosial dan kemasyarakatan
4. Kepala Urusan Keuangan dan asset
5. Bendahara
6. Wali Jorong

B. Kerangka Konseptual

Pada saat ini, perempuan telah mulai memasuki dan menduduki jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan, walaupun masih sangat minim, dan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Tapi paling tidak perempuan telah bisa menunjukkan eksistensinya dalam organisasi pemerintahan termasuk dalam pembangunan.

Kepemimpinan perempuan dalam kehidupan dewasa ini masih menjadi pro dan kontra, padahal seperti yang kita ketahui bahwa perempuan juga mempunyai dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut berkecimpung dalam birokrasi pemerintahan termasuk di nagari. Karna pada hakikatnya asensi dari kepemimpinan terletak pada moral kualitas dan kapabilitas pemimpin itu sendiri. Perempuan sebenarnya hanya merupakan pandangan kultural masa lampau, yakni memposisikan perempuan semata-mata sebagai subordinat. Penilaian itu bukanlah suatu yang mutlak, melainkan terus berubah sejalan dengan perkembangan zaman yang dinamis, sehingga dapat digambarkan dalam dalam bagan di bawah ini:

Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif menurut M. Nazir (1988 : 63), adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Jadi dengan demikian penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini mencoba menggambarkan/membuat deskripsi tentang apa yang menjadi peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan di nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya. Dikatakan demikian karena penelitian ini mencoba membuat deskripsi, gambaran, dan lukisan tentang suatu keadaan sebagaimana adanya.

Sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) “yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Sementara Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. (Moleong, 2005 : 4)

Penelitian kualitatif lebih utama digunakan pada masalah kemasyarakatan secara mendalam dengan maksud memahami sifat dan maknanya bagi perseorangan yang terlibat didalamnya. Kajian ini juga dikembangkan untuk menampilkan berbagai pandangan manusia yang berbeda dalam bidang-bidang ilmu sosial seperti : sejarah, filsafat, antropologi, sosiologi, dan psikologi (Margono 1997 : 108).

Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka yang di inginkan dari penelitian ini adalah . peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian sesuai dengan judul dan subjek penelitian Peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 2002 :90), dalam penelitian ini informan yang diperlukan adalah informan biasa.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. selanjutnya data yang diperoleh

sudah sesuai dengan fokus penelitian, maka proses pengumpulan data dianggap sudah selesai. dengan demikian penelitian kualitatif tidak dipersiapkan jumlah informannya. (Burhan Bungin, 2003: 53-54)

Jumlah informan yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebanyak 14 orang informan. Yang terdiri dari Unsur Cadiak Pandai (Bapak Drs. Herizal Aripin dan Bapak Eri Metrival), Alim Ulama (Bapak Endriwedi S.Ag), Penghulu (Bapak Drs. Elmidrus Dt. Nan kuniang), Wali Nagari (Bapak Efrizal Dt. Bandaro, SH), KAN (Bapak M. Dt. Asrajo), Unsur Bamus (Bapak Y. Dt. Bagindo dan Bapak Endrizal), Unsur LPMN (Bapak Adrian dan Bapak Amrizal), Unsur PKK (ibuk Revianora dan Ibuk Muniyati) dan Unsur Bundo Kandung (ibuk Herni Hayati, S.pd dan Ibuk Efnis, S.Pd)

D. Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data pokok tentang masalah penelitian yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang berkaitan dengan peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian. Data sekunder penelitian ini berupa dokumen-dokumen

dan arsip-arsip perempuan yang menjadi pemimpin di instansi pemerintahan maupun instansi lainnya.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah semua pihak atau informan yang memberikan informasi atau penjelasan tentang peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu, Alim ulama, Cadiak Pandai, Penghulu, Wali Nagari, KAN, Bamus, Sekretaris Bamus, Ketua LPMN, Anggota LPMN, Ketua PKK, anggota PKK, Bundo Kandung di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari arsip, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan peluang dan hambatan kepemimpinan perempuan di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan baik, maka penelitian ini menggunakan teknik :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (Lexy J Moleong, 2005: 190)

Wawancara ini diajukan kepada informan dan disusun dalam bentuk pertanyaan tentang kelebihan kepemimpinan perempuan, kelemahan kepemimpinan perempuan, ciri-ciri kepemimpinan perempuan, hak-hak perempuan, dan bagaimana kedudukan perempuan di Minangkabau menurut tokoh-tokoh masyarakat di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya. Dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti membuat kesepakatan dengan informan yaitu Cadiak Pandai, Alim Ulama, Penghulu, Wali Nagari, KAN, Bamus, Sekretaris Bamus, Ketua PKK, Anggota PKK, Ketua LPMN, Anggota LPMN dan Bundo Kandung di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya tentang kapan waktu akan diadakan wawancara tersebut. Sebelumnya peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertanyaan tersebut disusun sesuai dengan fokus penelitian

sehingga data yang diharapkan oleh peneliti nantinya dapat terkumpul semuanya.

b. Studi dokumentasi.

Studi dokumentasi merupakan teknik yang bertujuan untuk memperoleh bahan penelitian yang bersifat teoritis. Dalam menggunakan teknik ini peneliti mengumpulkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok penelitian yaitu peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu berupa catatan-catatan.

E. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data utamanya adalah peneliti sendiri, akan dibantu dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan tape recorder untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari informan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Jenis data, Sumber data, Teknik dan Alat Pengumpul Data Penelitian

Data			
Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Alat Pengumpulan Data
1. Data Primer a. Peluang perempuan dalam kepemimpinan nagari. b. Hambatan perempuan dalam kepemimpinan di nagari. 2. Data Sekunder a. Geografis nagari b. Mata pencarian c. Pendidikan, Agama, Sosial dan kebudayaan masyarakat d. Kelembagaan nagari, adat, dan kemasyarakatan	1. Cadiak Pandai. 2. Alim Ulama 3. Penghulu. 4. Bamus. 5. Ketua KAN 6. Wali Nagari 7. Ketua PKK 8. Bundo Kandung 9. Ketua LPMN 10. Anggota PKK 11. Sekretaris Bamus 12. Anggota LPMN	1. Wawancara 2. Studi dokumentasi	1. Tape recorder 2. Pedoman Wawancara

F. Uji Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya dan untuk menjamin kebenaran data yang valid, penulis mencoba mendekati diri di lapangan penelitian dengan wawancara yang lebih mendalam kepada informan yang di anggap dapat membantu peneliti dalam memperoleh data-data.

Denzim dalam Moleong (2001:178) membedakan empat macam triangulasi yaitu “Triangulasi sumber, metode, penyelidik, dan teori yaitu membandingkan

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, alat yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, metode dan teori data yang diperoleh dapat disimpulkan setelah membandingkan data dan sumber, metode dan teori yang berbeda.

Teknik Triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan mencocokkan sumber, metode dan teori yang penulis peroleh dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dengan demikian bisa dilihat apakah sumber, metode dan teori yang diperoleh dari wawancara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Baru kemudian dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai data dan informasi yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan. Analisa data juga merupakan metoda untuk mengukur hasil penelitian dan menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu.

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka. Hal ini disebabkan dengan adanya penerapan metode kualitatif.

Adapun langkah yang digunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat S. Nasution (2001: 45), yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh atau yang telah dikumpulkan diseleksi mana yang betul-betul dibutuhkan atau sebagai data utama, data pelengkap, serta data yang tidak diperlukan.

2. Klasifikasi data

Data yang dikumpulkan dari informan kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian yaitu peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan di nagari

3. Penyajian data

Data yang telah dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat naratif menurut fokus penelitian. Penyajian data dapat meliputi berbagai jenis teks. Dalam penelitian ini data yang telah dikelompokkan berdasarkan batasan penelitian yaitu hambatan dan peluang kepemimpinan perempuan.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan

dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung dengan melibatkan interpretasi penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

a. Kondisi Geografis

Secara keseluruhan, wilayah nagari Koto Gadang adalah 12,14 Km² atau sekitar 1.214 Ha dari keseluruhan luas Kecamatan Tanjung Raya. Dilihat dari jumlah jorong, Nagari Koto Gadang memiliki 3 Jorong, yaitu: Jorong Ateh, Jorong Baruah, dan Jorong Lambah. Dilihat dari ketinggian daerah, Nagari Koto Gadang terletak 450M dari permukaan laut. Suhu rata-rata 32°C, dan curahan hujan > 1.333mm/tahun. Secara Astronomi, Nagari Koto Gadang terletak antara 100° 05 BT - 100° 16 BT dan 0° 12 LS - 0° 25 LS. Berdasarkan letak geografis, maka dapat dilihat secara administratif, Nagari Koto gadang mempunyai batas-batas sebagai bareikut:

Sebelah utara : Koto Malintang

Sebelah Selatan : Nagari Koto Kaciak

Sebelah Barat : Bukit Barisan

Sebelah Timur : Danau Maninjau

(Profil Nagari Koto Gadang 2010)

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kenagarian Koto Gadang pada tahun 2010 adalah 2.304 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 167/km². Dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.187 jiwa. Sedangkan perempuan berjumlah 1.117 jiwa. Klasifikasi menurut rumah tangga berjumlah 531 kk atau 2304 jiwa. Jumlah berdasarkan jorong yaitu: (1) jorong Ateh berjumlah 851 jiwa, dengan jumlah KK 230. (2) jorong Baruah berjumlah 765 jiwa, dengan jumlah 175 KK. (3) jorong Lambah berjumlah 688 jiwa, dengan jumlah KK 126. (Data Penduduk Nagari Koto Gadang tahun 2010).

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Sarana sosial masyarakat yang ada di Kenagarian Koto Gadang adalah, sarana pendidikan TK sebanyak 1 sekolah. SD 2 sekolah. Sedangkan SMP dan SMA tidak ada nagari ini. Sarana ibadah seperti Mesjid sebanyak 2, Mushalla sebanyak 20, TPQ sebanyak 11, MDA sebanyak 2.

Nagari Koto Gadang memiliki topografi wilayah pegunungan dan perairan berupa Danau Maninjau. Sehingga sebagian besar mata pencarian penduduk bergerak dibidang pertanian dan perikanan/nelayan. Selain pertanian dan perikanan, penduduk desa juga bekerja sebagai pedagang, selebihnya adalah bermata pencaharian sebagai wiraswasta

dan pegawai negeri sipil yang jumlahnya relatif lebih sedikit.
(Profil Nagari Koto Gadang tahun 2010).

d. Visi dan Misi

Adapun visi dari Nagari Koto gadang adalah “Terwujudnya masyarakat yang Madani, aman, sejahtera, mandiri dan berkeadilan.

Misi Nagari Koto Gadang adalah sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan nilai-nilai sosial budaya hukum dan berkehidupan berpolitisasi demokrasi.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
3. Mendayagunakan segenap potensi ekonomi daerah berdasarkan hukum.
4. Melaksanakan management yang berkualitas, transparan dan accountable
5. Melaksanakan pemerataan pembangunan berbasis masyarakat yang berkeadilan.

B. Temuan Khusus

1. Syarat-syarat Untuk Menjadi Walinagari dan Bamus Menurut Perda Agam No. 12 Tahun 2007

a. Walinagari

Menurut pasal 17 Perda Agamno. 12 tahun 2007, syarat-syarat menjadi Walinagari adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan Syariat islam secara kaffah, berakhlakul karimah dan pandai membaca Al-quran
2. Setia kepada pacasila sebagai Dasar Negara. UUD Republik Indonesia, pemerintah
3. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Berkelakuan baik, jujur dan adil
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Mengenal nagarinya dan dikenal oleh masyarakat nagari setempat
8. Memahami, menghayati dan mengamalkan adat yang berlaku dalam nagari

9. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Walinagari atau Pegawai Negri atau penjabat/pegawai pada lembaga/badan

b. BAMUS (Badan Musyawarah)

Dalam pasal 52 Perda Agam no. 12 tahun 2007, menyatakan bahwa, yang dapat dipilih menjadi anggota Bamus Nagari adalah penduduk anak nagari dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat islam secara kaffah, berakhlakul karimah dan pandai membaca Al-quran
2. Setia kepada pacasila sebagai Dasar Negara. UUD Republik Indonesia, pemerintah
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Tidak pernah melanggar ketentuan adat
9. Bertempat di nagari yang bersangkutan atau bertempat tinggal yang mudah diketahui setelah terpilih menjadi anggota Bamus Nagari

Unsur-unsur dari Bamus menurut pasal 53 ayat 1 adalah:

1. Niniak Mamak

Niniak Mamak adalah seorang penggulu adat andika dalam kaumnya. Artinya seorang yang dihormati menjadi tuanku dalam keturunan yang berasal dari nenek perempuan atau kekerabatan menurut garis ibu, yang menyandang gelar datuk. (H. karmadi Rais DT. P. Simulie, tuangan limbago, Dramabudaya,2004

<http://www.scribd.com/doc/4551819/Tungku-Tigo->

[Sajaringan](#))

2. Alim Ulama

Alim Ulama disebut Suluang Bendang, suluh yang terang menderang dalam nagari. Alim ulamalah yang mengaji hukum-hukum agama, tentang sah dan batal, halal dan haram dan mengerti tentang nahu dan sharaf. Jadi alim ulama yang membimbing rohani untuk jalan ke akhirat, karena adat Minangkabau itu adat islam, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. (H. karmadi Rais DT.P.Simulie,Tuanganlimbago, Dramabudaya,2004.

<http://www.scribd.com/doc/4551819/Tungku-Tigo->

[Sajaringan\)](#)

3. Cadiak Pandai

Cadiak pandai adalah kelompok masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan cerdik memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Ia pandai mencari jalan keluarnya, sehingga ia dianggap pemimpin yang mendampingi niniak mamak dan alim ulama. Orang tersebut dibawa ikut berunding memecahkan berbagai masalah di nagari atau dikalangan masyarakat karena mereka memahami undang-undang dan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam hidup bernagari, berbangsa dan bernegara. (H. karmadi Rais DT.P.Simulie, Tuanganlimbago, Dramabudaya, 2004.

<http://www.scribd.com/doc/4551819/Tungku-Tigo->

[Sajaringan\)](#)

4. Bundo Kandung

Bundo Kandung adalah panggilan terhadap golongan wanita di Minangkabau, artinya Bundo adalah Ibu, dan Kandung artinya sejati. Jadi ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan. Adat Minangkabau memiliki sistem matrilineal, artinya garis keturunan diambil berdasarkan sisilah ibu, diungkapkan dalam gurindam sebagai berikut:

Bundo Kanduang limpapeh rumah nan gadang, artinya seorang bundo kanduang yang telah meningkat menjadi seorang ibu. Jadi ibu sebagai seorang limpapeh rumah gadang adalah tempat meniru dan teladan. Seorang ibu bertugas membimbing dan mendidik anak yang dilahirkan dan semua anggota keluarga lainnya di dalam Rumah Tangga.

Umbun puruak pagangan kunci, umbun puruak aluang bunian, maksudnya apabila seorang wanita sudah menikah, maka tugasnya akan bertambah. Kalau tugas itu dijalankan dengan ikhlas serta hati yang tulus, akan mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Pusek jalo kumpulan tali, maksudnya sebagai pengatur rumah tangga, bundo kanduang sangat menentukan baik atau buruknya rumah tangga. Untuk itu diperlukan pengetahuan sebagai pengatur rumah tangga. Seorang bundo kanduang haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, seperti ilmu yang mengatur ekonomi keluarga, etiket dan hal lainnya.

Sumarak dalam kampuang, hiasan dalam nagari, maksudnya sebagai anggota masyarakat, bundo kanduang haruslah memiliki rasa malu, baik dalam berpakaian, bertutur kata, bergaul dan hal lainnya.

Nan gadang basa batuah, kaunduang-unduang ka madinah, kapayuang panji ka sarugo, maksudnya adalah lambang kebanggaan dan kemuliaan yang dibesarkan dan dihormati serta diutamakan dan dipelihara, wanita minang juga harus memelihara diri dengan aturan agama islam. (H.karmadi Rais DT.P.Simulie,Tuanganlimbago, Drama budaya,2004.

<http://www.scribd.com/doc/4551819/Tungku-Tigo-Sajarangan>)

c. Tungku Tigo Sajarangan

Tungku Tigo sajarangan terdiri dari:

a. Penghulu

Penghulu merupakan seorang laki-laki yang dituakan pada sebuah suku di Minangkabau yang membidangi tentang seluk beluk urusan adat. Fungsi dari penghulu adalah pemimpin dalam urusan adat secara umum untuk memimpin anak kemenakannya dalam segala bidang dan menyelesaikan tiap sangketa atau perselisihan harta pusaka.

Adapun kedudukan penghulu adalah:

1. Mengendalikan pemerintahan menurut undang-undang adat.
2. Membimbing anak kemenakan baik langsung maupun tidak langsung.

3. Mengadakan rapat di balai adat untuk membicarakan strategi kehidupan dan kemakmuran serta keadilan masyarakat Minangkabau.

b. Alim Ulama

Alim ulama merupakan salah seorang pemimpin yang ada di Minangkabau dalam urusan agama, yaitu orang yang dianggap alim yang memiliki keimanan. Fungsi Alim Ulama di Minangkabau adalah sebagai pembina dan pembimbing masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Fungsi alim ulama dalam masyarakat menjadi ikatan lahir batin. Alim ulama berfungsi sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat.

Kedudukan Alim Ulama adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pemimpin dalam urusan ibadah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
2. Sebagai suluah dendang dalam nagari.
3. Sebagai pemberi petunjuk kepada masyarakat, dan alim ulama diharapkan dapat membawa umat islam ke jalan yang benar.

c. Cadiak Pandai

Cadiak pandai merupakan pemimpin masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta

pemikiran yang dapat mencari jalan keluar dari setiap masyarakat yang sedang dihadapi masyarakat Minangkabau.

Adapun fungsi dari Cadiak Pandai ini adalah:

1. Memberi petunjuk kepada seluruh masyarakat dan anak nagari dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
2. Untuk memajukan pemikiran masyarakat supaya tidak ketinggalan zaman.
3. Sebagai pemagar nagari di Minangkabau.
4. Memberi pertimbangan kepada penghulu di dalam mengambil keputusan dalam hal-hal yang bersifat umum.
5. Mampu menerapkan ilmu untuk kehidupan keluargaserta kepentingan masyarakat.

Sedangkan kedudukan Cadiak pandai adalah:

1. Cadiak Pandai sebagai pemimpin di bidang undang-undang dan komunikasi serta pengaturan yang bersifat umum.
2. Cadiak pandai sebagai pemimpin adalah karena mempunyai keindividuannya yaitu kaya dengan ilmu pengetahuan dan wajib memberi petunjuk kepada masyarakat nagari di Minangkabau.

3. Sebagai pemimpin yang banyak pengetahuan dan banyak tahu paham perkembangan dalam nagari atau di luar nagari, karena itu dianggap sebagai pagar.

2. Peluang Perempuan Untuk Menjadi Walinagari dan Bamus menurut Perda Agama no. 12 Tahun 2007

Memperhatikan syarat-syarat untuk menjadi Walinagari dan Ketua Bamus dalam perda Agama No. 12 Tahun 2007, tidak satupun larangan tercalonnya perempuan untuk menjadi walinagari dan ketua Bamus.

Oleh sebab itu, cukup besar peluang perempuan untuk menduduki dalam pemerintahan di nagari, tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi Walinagari ataupun Ketua Bamus. Namun kenyataannya, di nagari Koto Gadang ini tidak terdapat perempuan yang menduduki jabatan sebagai Walinagari ataupun Ketua Bamus.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Walinagari, Ketua KAN, Ketua Bamus, dan dan Ketua PKK, menyangkut tidak adanya perempuan yang tampil sebagai Walinagari dan Ketua Bamus di nagari.

Wawancara dengan Walinagari, bapak Efrizal Dt. Bandaro, SH, pada tanggal 19 Oktober 2011, menyatakan bahwa:

Memang secara tertulis tidak dimuatkan persyaratan untuk menjadi Walinagari dan Ketua bamus seorang laki-laki, namun, wewenang yang diberikan kepada Walinagari yang tercantun dalam pasal 18 ayat 2 bagian J, disitu menerangkan

bahwa Walinagari mendukung kelangsungan adat basabdi syara', syara' basandi kitabullah. Berarti itu mendukung falsafah adat Minangkabau. Dalam Minangkabau yang memimpin tetap laki-laki. Jadi tidak perlu rasanya dimuatkan kalau salah satu syarat menjadi Walinagari itu laki-laki, itu merupakan salah satu sarat yang tersirat, dilihat dari wewenang yang diberikan keada Walinagari.

Dalam wawancara dengan Ketua KAN bersama Bapak M. Dt.

Asarajo, pada tanggal 19 Oktober 2011 juga mengatakan bahwa:

Nagari ini masih kental dengan nilai adat dan agama, yang mana masih menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Dalam pandangan adat dan agama, perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan salah satu kewajiban Walinagari adalah membina, mengayomi, dan melestarikan nilai agama, social budaya dan adat. Keikutsertaan perempuan dalam kepemimpinan ada batas-batasnya. Kalau untuk menjadi seorang Walinagari dan Ketua Bamus, itu sudah melampaui batas kewajaran bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, walaupun syarat untuk menjadi walinagari tidak disebutkan harus seorang laki-laki.

Namun, pendapat dari Bapak Y. Dt. Bagindo (Ketua Bamus)

memberikan komentar lain, dalam wawancara bersama beliau pada tanggal 20 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa:

Tidak ada salahnya Ketua bamus ini seorang perempuan, namun, dari dahulu perempuan tidak pernah mengambil kesempatan tersebut, mereka menganggap hanya laki-laki yang pantas untuk menjadi Walinagari ataupun Ketua bamus. Tidak ada perempuan yang mencalonkan dirinya untuk jabatan ini, walaupun mereka mampu, tapi mereka tidak pernah memperlihatkan kemampuan yang mereka miliki. Ditambah lagi faktor pendukung dari luar yang kurang, yaitu kurangnya dukungan terhadap perempuan untuk menjadi Walinagari ataupun Ketua Bamus.

Ibuk Reniovera (ketua PKK) memberikan pendapat tentang ini, dalam wawancara pada tanggal 20 Oktober 2011, beliau menyatakan:

Memang tidak ada syarat untuk menjadi Walinagari ataupun Ketua Bamus harus seorang laki-laki. Tapi, untuk menjadi Walinagari ataupun Ketua Bamus bukanlah tugas yang ringan dan gampang. Salah satunya dalam hal waktu, jika perempuan menjadi Walinagari atau Ketua Bamus, secara otomatis waktu mereka akan lebih banyak di lingkungan pekerjaannya. Sedangkan perempuan juga memiliki tugas di rumah, sebagai ibu rumah tangga. Mereka harus bias membagi waktuantara pekerjaan dan keluarga. Sedangkan untuk menjadi Walinagari dan Ketua Bamus ini harus siap kapan saja bila dibutuhkan. Termasuk jika diperlukan pada waktu malam hari, dan perempuan tidak akan mungkin meninggalkan anak-anak mereka pada malam hari, berbeda dengan laki-laki yang memiliki kelonggaran waktu dibanding perempuan.

Dari hasil wawancara di atas, dapat kita lihat bahwa, perempuan tidak memiliki peluang untuk menjadi Walinagari dan Ketua Bamus. Disebabkan karena pandangan adat dan agama yang mengatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan dan tidak pantas untuk menjadi pemimpin nagari, menyankut wewenang yang dimiliki oleh Walinagari untuk menjaga nilai adat dan agama. Selain itu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh perempuan tidak selonggar dengan waktu yang dimiliki oleh laki-laki.

3. Peluang Perempuan Dalam Kepemimpinan di Nagari

Majunya ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi, disertai pendidikan yang semakin tinggi, membuat perempuan memiliki kesempatan untuk merasakan itu semua.

Tidak hanya laki-laki yang mampu memimpin, tetapi perempuan juga mampu untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Di balik sosok perempuan yang diidentik sebagai insan yang lemah lembut, perempuan juga memiliki kelebihan-kelebihan dalam kepemimpinannya. Karena hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh perempuan seperti yang dikerjakan laki-laki. Salah satunya, seperti yang kita lihat disekitar kita, tidak sedikit perempuan yang berprofesi menjadi tukang ojek, yang seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki.

Selain itu, sudah banyak perempuan yang tampil seperti dalam partai politik, bahkan di bangku pemerintahan, Salah satunya di nagari. Perempuan memiliki peluang untuk menjadi seorang pemimpin

Sesuai yang di ungkapkan oleh Ibuk Herni Hayati, S.pd (unsur Bundo Kanduang), dalam wawancara pada tanggal 30 Juli 2011:

Tampilnya perempuan sebagai perempuan, itu hal yang bagus, ini merupakan salah satu dari bentuk emansipasi wanita. Ada beberapa peluang bagi perempuan untuk bisa tampil menjadi seorang pemimpin. Diantaranya yaitu: pendidikannya yang tinggi, pengalaman yang mereka miliki, kemauan dan kesadaran, ilmu yang mereka peroleh, baik dalam pendidikan maupun dalam bermasyarakat. Dan yang paling terpenting disini, adanya kemampuan mereka untuk bersosialisasi, karna tanpa adanya sosialisasi ini akan percuma bagi mereka memiliki pendidikan yang tinggi, karena untuk apa ilmu yang mereka miliki itu kalau hanya mereka berdiam diri di rumah. Intinya disini peluang tersebut tidak terlepas dan dikunci oleh situasi dan kondisi yan mereka miliki. Tampilnya perempuan sebagai pemimpin, ini bisa menjadi motivasi bagi generasi penerus, untuk membuktikan bahwa perempuan tidak selalu menjadi keterbelakangan dari laki-laki. Dan sikap keibuan

yang melekat pada diri mereka, yang menjadikan nilai positif bagi perempuan dalam memimpin, apalagi sudah ada Konvensi Deklarasi Universal HAM ini, berarti pemerintah sudah menjalankan emansipasi wanita termasuk untuk menjadi seorang pemimpin.

Ibuk Efnis, S.Pd (Bundo Kandung) dalam wawancara pada tanggal 12 Oktober 2011 juga mengungkapkan:

Hal yang sangat bagus, perempuan bias tampil menjadi pemimpin. Apalagi sekarang sudah zaman emansipasi wanita, perempuan berhak untuk dapat mengembangkan diri mereka, termasuk untuk menjadi seorang pemimpin. Banyak yang menjadi peluang bagi perempuan untuk bisa tampil menjadi pemimpin, salah satunya pendidikan yang perempuan miliki. Zaman sekarang pendidikan perempuan tidak kalah ti nggi dengan pendidikan yang dimiliki oleh laki-laki.

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Y. Dt Bagindo (Ketua Bamus) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 yang menyatakan:

Untuk menjadi seorang pemimpin, selalu ada peluang bagi perempuan. Kesempatan itu sudah diberikan, tergantung kepada kemampuan mereka. Bagi mereka yang aktif, wanita yang mengikuti perkembangan, mereka akan mendapatkan kesempatan dan peluang itu. Tapi bagi yang mereka yang tidak aktif, tidak mau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ataupun dalam organisasi-organisasi, mereka tidak akan bisa mendapatkan peluang tersebut. Buktinya dalam PNPM di nagari, ada terdapat SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang merupakan simpanan pokok bagi perempuan, dan dapat melakukan peminjaman pada bagian tersebut. Yang diketuai oleh perempuan, yang hanya perempuan yang aktif disana. Termasuk dalam hal peminjaman, hanya perempuan yang boleh melakukan peminjaman.

Dalam wawancara bersama bapak Endrizal (Sekretaris Bamus) pada tanggal 12 Oktober 2011 menyatakan:

Menjadi seorang pemimpin, terutama bagi perempuan, tidak mudah, namun tidak juga susah, apalagi di nagari. Hanya tertentu saja perempuan yang menjadi pemimpin. Karena, yang namanya kita orang Minangkabau, tetap yang memimoin itu laki-laki. Tapi dikarnakan perubahan zaman, perempuan sudah banyak yang memiliki pendidikan yang tinggi, seperti halnya laki-laki. Tidak seperti zaman dahulu, perempuan jarang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Itu merupakan salah satu peluang bagi perempuan, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka mampu menjadi seorang pemimpin. Tapi, yang namanya perempuan mereka harus tau batasan yang mereka miliki mengingat kodrat mereka juga sebagai pekerja di lingkungan keluarga.

Tentang peluang yang dimiliki oleh perempuan dalam kepemimpinan, bapak Efrizal Dt. Bandaro, SH (Walinagari) dalam wawancara pada tanggal 13 Oktober 2011 juga mengungkapkan:

Berbicara tentang kepemimpinan, tidak ada salahnya perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi kita lihat zaman sekarang yang telah memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kebebasan berpolitik. Tidak sedikit perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan kemauan. Itu semua harus diberikan dukungan dan kesempatan oleh kaum laki-laki. Tanpa adanya dukungan dan kesempatan ini, perempuan tidak akan bias tampil menjadi seorang pemimpin. Seperti perempuan yang sudah memiliki suami, mereka harus mendapat ijin terlebih dahulu dari suami mereka untuk bias berperan di luar lingkungan keluarga.

Untuk di Minangkabau, sesuai dengan falsafah *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*, pemimpin ada batasnya, Sesuai yang juga diungkapkan oleh Drs. Elmidrus Dt. Nan Kuniang (Panghulu) pada tanggal 27 juli 2011 yang menyatakan bahwa:

Berpedoman kepada falsafah minangkabau, kepemimpinan ada batasannya. Memang sekarang sudah ada perempuan yang tampil untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi, semua itu harus sesuai dengan perkembangan zaman dan peranannya dalam adat Minangkabau. Memang dalam aturannya ada keterwakilan perempuan dalam bangku pemerintahan. Namun, keterwakilan perempuan ini masih dalam batas kewajarannya dalam kelembagaan. Seperti kelembagaan Bundo kanduang dan PKK yang memang dibutuhkan perempuan untuk mengelolanya. Nah, disinilah peluang bagi perempuan untuk tampil menjadi seorang pemimpin, karena adanya kelembagaan yang memang dibutuhkan perempuan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak M. Dt. Asarajo (Ketua KAN) dalam wawancara pada tanggal 29 Juli 2011 yang menyatakan:

Tampilnya perempuan sebagai pemimpin di Nagari tidak ada masalah, asalkan disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Dengan dibentuk bidangnya yang sesuai itulah yang menjadi peluang bagi perempuan itu sendiri. Disitu mereka mampu untuk menjadi seorang pemimpin, karena memang mereka menguasai bidang mereka masing-masing.

Perempuan memang harus tampil untuk menjadi seorang pemimpin, tidak selalu menjadi keterbelakangan oleh kaum laki-laki. Sesuai yang diungkapkan oleh Ibuk Revianora (Ketua PKK) pada tanggal 28 Juli 2011, yang menyatakan bahwa:

Memang seharusnya perempuan juga tampil untuk menjadi seorang pemimpin. Perempuan tidak hanya di kasur, di dapur dan di sumur. Itu hanya akan membuat kita selalu menjadi keterbelakangan dari kaum laki-laki, sebenarnya perempuan memiliki sifat-sifat yang berasal dari dalam dirinya yang mampu menjadikan mereka seorang pemimpin, seperti sifat perempuan yang lembut dan keibuan yang ia miliki akan membuat perempuan mudah menyesuaikan diri dan

bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini yang akan membuat perempuan mudah diterima dalam masyarakat.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh ibuk Muniyati (unsur PKK) dalam wawancara pada tanggal 13 Oktober 2011 mengatakan bahwa:

Setiap perempuan pasti bangga melihat adanya perempuan yang tampil sebagai pemimpin, berarti ada kesempatan bagi perempuan untuk bias tampil dalam masyarakat, tidak hanya sebagai pekerja di rumah. Apalagi ditambah dengan adanya kemauan yang kuat dan skill yang mereka miliki. Itu sudah cukup bagi perempuan untuk bisa menjadi seorang pemimpin.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Adrian (Ketua LPMN) pada tanggal 31 Juli 2011, yang menyatakan bahwa:

Di Minangkabau yang namanya pemimpin tetap laki-laki, tetapi karena situasi dan kondisi zaman yang berubah, perempuan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Tergantung bisa tidaknya diterima oleh masyarakat, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sesuai dengan azas musyawarah dan mufakat. Dan perempuan diberi kebebasan dan dukungan oleh masyarakat dengan tidak dibatasi gerak-geriknya, apa yang diinginkan mereka, dan didukung oleh masyarakat, seperti di nagari ini telah diadakan beberapa kelembagaan yang memang khusus dibuka untuk perempuan.

Dalam wawancara bersama Bapak Drs. Herizal Aripin (Cadiak pandai) pada tanggal 30 Juli 2011 juga menyatakan:

Perempuan bisa saja untuk menjadi seorang pemimpin, asalkan mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi serta mereka mampu dan memiliki kemauan untuk terjun ke masyarakat, tapi, ke tiga hal pokok tadi harus ada, harus sejalan, karena itu sangat berhubungan erat. Percuma pendidikan yang tinggi tanpa adanya kemauan. Sebab, ada juga perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi, tapi mereka lebih memilih untuk berdiam diri di rumah.

Bapak Eri Metrival (unsur Cadiak Pandai) dalam wawancara pada tanggal 13 Oktober 2011 menyatakan:

Perempuan tampil menjadi seorang pemimpin itu hal yang sangat bagus, tidak ada masalah. Tapi mereka harus ingat, selain mereka memiliki tugas di lingkungan masyarakat, mereka juga memiliki tugas mereka sebagai ibu rumah tangga.

Selain dari hasil wawancara dengan beberapa informan, jua didapat data nama-nama perempuan yang tampil sebagai pemimpin di Nagari Koto Gadang ini. Berikut nama-nama perempuan yang duduk dalam bangku pemerintahan:

Tabel 4.1

Perempuan yang duduk di bangku pemerintahan

dalam nagari

No	Nama	Lembaga/jabatan	Periode jabatan
1	Neni Suryati	Bamus/anggota	2004-2009
2	Elvi	Bamus/bendahara	2004-2009
3	Elmiwati	Bamus/anggota	2009-2011
4	Reniovera	Ketua PKK	2009-2011
5	Herni Hayati, S.Pd	Bundo kaudang	2009-2011
6	Reni Juita	Ketua simpan pinjam Perempuan (SPP)/PNPM	2009-2011

Sumber: Arsip kantor Walinagari Koto Gadang periode 2004-2009 dan 2009-2011

Dilihat dari hasil wawancara dan ditambah lagi adanya bangku pemerintahan yang diduduki oleh perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa sudah ada terlihat peluang bagi perempuan untuk bias tampil menjadi pemimpin di nagari.

4. Hambatan Perempuan Dalam Kepemimpinan di Nagari

Untuk menjadi seorang pemimpin, tidak mudahlah bagi perempuan. Banyak rintangan-rintangan yang menghalangi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena dalam pandangannya perempuan diidentik sebagai sosok yang lemah, halus dan emosional.

Pandangan ini telah memosisikan perempuan yang seolah-olah harus dilindungi dan selalu bergantung kepada laki-laki. Akibatnya jarang sekali perempuan untuk bisa tampil menjadi seorang pemimpin. Belum lagi isu-isu gender dan pandangan agama yang menghambat perempuan untuk bisa tampil untuk menjadi seorang pemimpin.

Sesuai yang di ungkapkan oleh Bapak Endriwedi, S.Ag (Alim Ulama) dalam wawancara pada tanggal 28 Juli 2011 yang menyatakan bahwa:

Dalam pandangan islam, memang laki-laki yang dianjurkan untuk menjadi seorang pemimpin. Sesuai yang di ungkapkan dalam al-qur'an bahwa laki-laki hakim bagi perempuan. Selain itu laki-laki memiliki waktu yang luas dibandingkan perempuan. Perempuan memiliki beban ganda yang mereka pikul, karena selain mereka menjadi pemimpin di suatu lembaga, ia juga memiliki tugas sebagai Ibu Rumah Tangga. Memang kodratnya yang membuat perempuan yang tidak bisa untuk tampil menjadi seorang pemimpin. karena yang namanya pemimpin tugasnya 24 jam, sedangkan perempuan harus selalu ada untuk keluarganya seperti memberi waktu untuk anak-anak mereka.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Drs. Elmidrus. Dt. Nan kuniang yang merupakan seorang Panggulu dalam wawancara pada tanggal 27 Juli 2011 yang mengatakan bahwa”

Memang salah satu hambatannya adalah pengaruh historis ini, karena kodratnya. Seperti yang kita lihat bahwa kebebasan yang dimiliki perempuan tidak seberapa dibandingkan laki-laki. Perempuan harus bisa membagi waktunya dengan keluarga. Dan dalam pandangan suku Minangkabau, perempuan cuma berperan sebagai pekerja rumah tangga.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Herni Hayati, S.Pd, dalam wawancara pada tanggal 30 Juli 2011 yang mengatakan bahwa:

Dalam pandangan agama, perempuan tidak dibenarkan untuk jadi pemimpin. Karena dalam pandangan Islam, laki-laki yang memimpin, karena laki-laki merupakan imam bagi perempuan, selain itu tingkat pendidikan perempuan yang rendah yang membuat perempuan tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin.

Dalam wawancara bersama ibu Efnis, S.Pd (unsur Bundo kanduang) dalam wawancara pada tanggal 12 Oktober 2011, juga mengungkapkan hambatan bagi perempuan dalam kepemimpinan di nagari, yang menyatakan bahwa:

Pendidikan tinggi yang dimiliki oleh perempuan sekarang, terkadang tidak mereka manfaatkan untuk ikut berorganisasi dalam masyarakat. Jarang perempuan yang mau tampil dalam masyarakat, mengingat kodrat mereka sebagai perempuan, mereka juga harus bekerja sebagai ibu rumah tangga untuk keluarganya.

Hambatan historis memang masih berpengaruh terhadap tampilnya perempuan sebagai pemimpin, hal tersebut sesuai yang

diungkapkan oleh Bapak Drs. Hendrizal Aripin (Cadiak Pandai) pada tanggal 30 Juli 2011 yang menyatakan bahwa:

Sejarah perjuangan perempuan dahulu memang masih berpengaruh terhadap tampilnya perempuan untuk menjadi pemimpin saat sekarang. Dari dulu memang sudah adanya keterbatasan terhadap perempuan. Selama ini perempuan kurang diberi kebebasan, sehingga gerak mereka terbatas. Mereka kurang diberi kesempatan untuk bisa tampil, selain itu, masih kurangnya wanita yang cerdas karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.

Selain itu, hambatan bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin yaitu tidak adanya kemauan yang timbul dari diri mereka, seperti yang diungkapkan oleh bapak Eri Metrival (Cadiak Pandai) dalam wawancara pada tanggal 13 Oktober 2011 menyatakan bahwa:

Tidak semua perempuan yang memiliki kemauan untuk menjadi seorang pemimpin, padahal mereka memiliki potensi untuk itu. Namun, kurangnya kemauan mereka untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Inilah salah satu yang merupakan hambatan bagi perempuan untuk bias tampil menjadi seorang pemimpin.

Dalam wawancara bersama Bapak M. Dt. Asarajo, (ketua KAN), pada tanggal 29 Juli 2011, mengungkapkan bahwa:

Memang tidak mudah bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh perempuan. Walau bagaimanapun, perempuan juga bertugas di rumah, tidak hanya di luar rumah saja. Lain halnya dengan laki-laki, yang lebih banyak waktu untuk urusan luar rumah, laki-laki tidak memikirkan untuk mengurus anak, memasak, dan urusan rumah tangga lainnya.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibuk Revianora (ketua PKK) dalam wawancara pada tanggal 28 Juli 2011, yang mengungkapkan bahwa:

Untuk menjadi seorang pemimpin bagi perempuan, memang tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi oleh perempuan, salah satu contohnya ya tugas perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak bisa mereka tinggalkan. Selain itu masih ada pertanggung jawaban oleh laki-laki, yang mampu mengerjakan suatu pekerjaan, dan kurangnya tingkat sosialisasi perempuan, sehingga membuat mereka tidak ingin tampil dalam masyarakat.

Dalam wawancara dengan Bapak Adrian selaku ketua LPMN, pada tanggal 31 Juli 2011 juga mengungkapkan hambatan bagi perempuan dalam menjadi pemimpin, beliau mengungkapkan bahwa:

Memang ada pengaruhnya hambatan historis ini terhadap tampilnya perempuan untuk menjadi pemimpin pada saat sekarang. Memang cerita historis itu sebagai dasar, dari zaman dahulu perempuan kurang menonjol. Sampai saat sekarang ini pun perempuan kurang menonjol, jika mereka tidak seorang guru, mereka tidak ingin tampil, karena cara beradaptasinya yang kurang. Jika mereka tidak diminta keikutsertaannya, mereka tidak akan maju, tapi jika diminta, mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Apalagi di segi adat, perempuan tidak terlibat untuk menjadi seorang pemimpin, kecuali dalam untuk menjadi Bundo Kandung.

Wawancara bersama Bapak Amrizal (anggota LPMN) pada tanggal 13 Oktober 2011 juga mengungkapkan:

Untuk menjadi pemimpin di nagari, masih jarang yang perempuan. Dikarenakan di nagari perempuan yang cerdas masih kurang, jangankan untuk mencari pendidikan yang tinggi, perempuan yang tamat SMA saja masih jarang.

Pendidikan perempuan menjadi hal yang nomor dua. Lebih diutamakan laki-laki, ini masih dipengaruhi oleh pandangan adat, bahwa perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi, yang nantinya juga laki-laki yang bekerja.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat, bahwa disamping peluang yang dimiliki oleh perempuan untuk menjadi pemimpin, juga terdapat hambatan-hambatan bagi perempuan untuk menjadi perempuan di nagari.

C. Pembahasan

Berdasarkan diskripsi data di atas, maka diperoleh gambaran mengenai peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di kenagarian Koto Gadang kecamatan Tanjung Raya.

1. Peluang dan kekuatan bagi perempuan dalam kepemimpinan di nagari.

Berdasarkan deskripsi data di atas, dan hasil penelitian yang diperoleh. Selanjutnya dikemukakan pembahasan tentang peluang dan kekuatan perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

Yang merupakan peluang dan kekuatan bagi perempuan dalam kepemimpinan di nagari adalah

Pertama, adanya peraturan perundang-undangan seperti Perda Agam no. 12 Tahun 2007 yang tidak melarang perempuan mencalonkan diri jadi pemimpin di nagari, seperti Bamus dan Walinagari

Kedua, kebebasan yang diberikan kepada perempuan. Kebebasan dan dukungan yang diberikan kepada perempuan. Kebebasan disini maksudnya penghapusan segala bentuk diskriminasi yang menghambat perempuan untuk bisa tampil sebagai pemimpin. Sesuai yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM, yang merupakan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1984 yang mencantumkan “mengingat bahwa salah satu tujuan PBB adalah untuk meningkatkan penghargaan sedunia sebagai hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang melanggar asas persamaan hak dan penghormatan pada martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan, persamaan hak dengan pria dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya di negaranya, merintangai pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga menyulitkan perkebangan kemampuan wanita dalam pelayanan terhadap negaranya dan kemanusiaan..”.

Ketiga, kemampuan yang dimiliki oleh perempuan, Kemampuan disini maksudnya, potensi yang dimiliki oleh perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Di samping kemampuan, perempuan juga harus mempunyai kemauan. Sebab, akan percuma jika perempuan hanya memiliki kemampuan, tanpa adanya kemauan, kemampuan

yang dimiliki seseorang itu akan percuma. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kimbal Young (dalam Kartono. 1983:40) yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian yang khusus dan tepat.

Keempat, tingkat pendidikan yang tinggi. Ini juga akan menjadi peluang bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena tanpa adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang, ia tidak akan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena, pendidikan inilah yang akan mempengaruhi tingkat kecerdasan dan prestasi seseorang yang akan menjadi kelebihan dari seseorang untuk menjadi pemimpin. Sesuai yang dikatakan Stogdil (Permadi, 1996:17-15) bahwa pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu: (1) kapasitas, yaitu kecerdasan, kemampuan berbicara, keaslian, dan kemampuan menilai. (2) prestasi, yaitu gelar keserjanaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Kelima, sifat kelembutan dan jiwa keibuan yang merupakan sifat bawaan dari lahir oleh perempuan, Yang mana sifat kelembutan merupakan kelebihan dari kepemimpinan perempuan. sesuai yang dikemukakan oleh Divera Dicoksono (redaksi@warta egov.com,2007) yang mengemukakan kelebihan kepemimpinan perempuan salah satunya memiliki sikap dan naluri kelembutan, ketekunan, kesabaran,

ketelitian dan mudah bersimpati dengan lingkungan sekitarnya. Dan jiwa keibuan yang mereka miliki membuat mereka terlahir sebagai pembujuk ulung, yang merupakan ciri-ciri kepemimpinan yang merupakan kelebihan dari kepemimpinan perempuan. (Caliver dalam Roma Lisa, 2009).

2. Hambatan dan tantangan bagi perempuan dalam kepemimpinan di nagari

Selanjutnya dikemukakan pembahasan tentang hambatan serta tantangan bagi perempuan dalam kepemimpinan nagari di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya.

Yang merupakan hambatan dan tantangan bagi perempuan dalam kepemimpinan di nagari diantaranya:

Pertama, pandangan adat dan agama. Dalam islam, yang menjadi pemimpin tetap laki-laki. Dalam pandangan adat juga begitu, perempuan tidak dibenarkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kecuali untuk menjadi seorang Bundo Kanduang. Yang mengurus hubungan kekeluargaan dan kebudayaan. Sesuai menurut Boestami, dkk (1992:85) dalam bukunya "*kedudukan dan peranan perempuan dalam kebudayaan Minangkabau*" yang mengatakan peranan perempuan di dalam dan di luar rumah gadang adalah yang berhubungan erat dengan kebudayaan Minangkabau, sebagai suatu masyarakat yang matrilineal, yaitu dalam pola hubungan kekeluargaan.

Kedua, beban ganda yang pikul oleh perempuan, selain mereka menjadi pemimpin di suatu lembaga, ia juga memiliki tugas sebagai Ibu Rumah Tangga. Itu semua sudah menjadi kodratnya yang membuat perempuan yang tidak bisa untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Ini sesuai yang di ungkapkan oleh Ibrahim (1991:16) bahwa yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin salah satunya yaitu “hambatan sikap pandang”, yang menyangkut tugas laki-laki dan perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk rumah, sedangkan laki-laki sebagai makhluk luar rumah. Dan segala tugas-tugas kerumahtanggaan tidak layak diurus oleh laki-laki, dengan kata lain, tugas rumah tersebut menjadi tanggung jawab perempuan.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Monika Menik dalam artikelnya (<http://himansa.blogspot.com/2007/03/artikel>) bahwa, selain terdapat kelebihan pada kepemimpinan perempuan, juga terdapat kekurangannya, salah satunya beban ganda yang dimiliki perempuan antara lain menjadi ibu rumah tangga dan pemimpin akan mempersulit perempuan karena membuat bingung mana yang akan didahulukannya antara rumah tangga dan pekerjaan

Ketiga, kurangnya kesadaran perempuan untuk mau tampil di masyarakat. Perempuan lebih memilih berdiam diri di rumah, ketimbang aktif dalam masyarakat. Karena mereka sering

meremehkan kemampuan yang mereka miliki. Apabila mereka tidak diminta untuk ikut serta, mereka tidak akan mau. Sesuai yang dikatakan oleh Monica Menik dalam artikelnya melalui website salah satu yang merupakan kelemahan yang membuat perempuan sulit untuk berkembang yaitunya sifat yang tidak ingin menonjol. Tidak sedikit perempuan yang tidak ingin menonjolkan diri saat terlibat tugas-tugas penting. Wanita cenderung meremehkan kemampuannya dalam mempelajari hal-hal baru. Mereka merasa ragu apakah bisa untuk menyelesaikan tugas itu. Perempuan tidak menyadari bahwa mereka memiliki kompetensi. (<http://himansa.blogspot.com/2007/03/artikel>).

Keempat, masih banyak pendidikan perempuan yang rendah di nagari. Bagaimana perempuan bisa jadi pemimpin, pendidikan perempuan kurang diperhatikan, Berbicara soal pendidikan, ini merupakan hal yang sangat penting. Apalagi untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin harus memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi untuk dapat menyelesaikan masalah. Namun, jarang sekali perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Pendidikan Penduduk Nagari Koto gadang

No	Uraian	Jumlah	
		Lk	Pr
1	Tidak tamat SD	35	40
2	Tamat SD	120	100
3	Tamat SLTP	132	118
4	Tamat SLTA	150	127
5	Tamat universitas/akademi	45	39
6	Kejar paket yang mengikuti ujian persamaan		
	a. Tingkat SD/paket A	-	-
	b. Tingkat SLTP/paket B	-	-
	c. Tingkat SLTA/paket C	25	17

Sumber: profil nagari Koto Gadang tahun 2010

Dari data di atas, dapat kita lihat, masih banyak perempuan yang memiliki pendidikan yang di bawah pendidikan laki-laki. Karena, sebagian besar pendidikan perempuan tidak begitu diperhatikan. Dan inilah salah satu bentuk subordinasi gender terhadap perempuan. Di dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi sosial, DR. Mansour Fakih (1997:15-16) menuliskan bahwa “subordinasi karena gender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Salah satunya adanya anggapan yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga”.

Kelima, kurangnya rasa sosialisasi perempuan dalam masyarakat. Karena, untuk bisa tampil menjadi seorang pemimpin, sangat diperlukan sosialisasi seseorang dalam masyarakat. Karena tanpa adanya rasa sosialisasi, akan membuat perempuan bersikap pasif. Perempuan tidak akan mampu untuk menyampaikan ide-ide mereka. Bersikap pasif inilah yang merupakan kelemahan yang membuat wanita sulit berkembang. (MonikaMenik /<http://himansa.blogspot.com/2007/03/artikel>).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peluang dan kekuatan bagi perempuan untuk dapat tampil menjadi seorang pemimpin adalah:
 - a. Peraturan Daerah yang tidak melarang pencalonan perempuan untuk menjadi pemimpin di nagari, seperti Bamus dan Walinagari.
 - b. Kebebasan yang diberikan oleh kaum laki-laki kepada perempuan, terutama bagi perempuan yang sudah bersuami, untuk tampil dalam masyarakat.
 - c. Kemampuan yang dimiliki oleh perempuan untuk menjadi seorang pemimpin
 - d. Tingkat pendidikan yang tinggi
 - e. Adanya sifat kelembutan dan jiwa keibuan, yang merupakan sifat bawaan dari seorang perempuan
2. Hambatan serta tantangan bagi perempuan dalam kepemimpinan di nagari diantaranya:
 - a. Pandangan Adat Minangkabau dan Agama Islam, yang melarang perempuan tampil sebagai pemimpin
 - b. Beban ganda yang dipikul oleh perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga dan pemimpin di nagari.

- c. Kurangnya kesadaran perempuan untuk mau tampil di masyarakat.
- d. Masih banyak perempuan yang memiliki pendidikan yang rendah.
- e. Masih kurangnya sosialisasi perempuan dalam masyarakat,

B. SARAN

Adapun saran yang akan di berikan adalah:

1. Terutama untuk perempuan, agar mampu menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki.
2. Hendaknya perempuan mampu tampil untuk menjadi seorang pemimpin, seperti halnya laki-laki, karena perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama.
3. Bagi laki-laki hendaknya memberikan kebebasan dan dukungan terhadap perempuan untuk bisa tampil menjadi pemimpin.
4. Bagi pemerintah, hendaknya menjamin keterwakilan perempuan dalam bangku pemerintahan sesuai yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Sudrajat, "Kepemimpinan Perempuan" di akses tgl 15/10/2010, www.manajemenpendidikan.com
- Boestami, dkk. 1992. "Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Minangkabau" Padang: Esa Padang
- Baluwarti, "Relief Perjuangan Bangsa Indonesia". Di akses tgl 21/01/2011 <http://urang-minang.blogspot.com/2007/12/rasuna-said.html>
- Frankel, Lois. 2007. "See Jane Lead 99 Kiat Sukses Memimpin Bagi Perempuan" Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imran Manan. 1995. "Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional" Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minang Kabau
- Lenny I.F.W. Simantupang. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi". <http://www.studideskriptif.com> Di akses tgl 15/10/2010
- Luki Sandra Amelia. "Antisipasi Perjuangan Perempuan dalam UU Pemilu". <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/jender-and-politik/288-antisipasi-perjuangan-perempuan-dalam-uu-pemilu>". Di akses tgl 25 Juni 2011
- Maleong, Lexy J. 2005. "Metode Penelitian Kualitatif" Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mansour Fakih, 1996. "Analisis Gender dan Transformasi Sosial" Jakarta. Pustakabelajar.
- Monica Melik. "Kepemimpinan Perempuan". Di akses tgl 23/12/2010 <http://himansa.blogspot.com/2007/03/artikel>.
- Lisa, Roma. 2009. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Skripsi. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 100 halaman.
- Rais, H. Karmadi. 2004. "Tuangan Limbago Darmabudaya" diakses tanggal 17/10/2011. <http://www.scribd.com/doc/4551819/Tungku-Tigo-Sajaringan>
- Setyawan Salam, Dharma. 2004. "Manajemen Pemerintahan Indonesia" Jakarta. Djambatan.
- Sutan Zain Mohammad dan Badudu. "Kamus Umum Bahasa Indonesia". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27. 2007. Jakarta: Gramedia.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. 2007. Jakarta: Gramedia.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Perda Kabupaten Agam nomor 12 tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari

Format Wawancara

A. Pertanyaan untuk tungku tigo sajarangan (cadiak pandai, Alim ulama, Panggulu), KAN, BAMUS, Walinagari

1. Bagaimana menurut pendapat bapak, tampilnya perempuan sebagai pemimpin di nagari? Dan apa saja yang memberi peluang bagi perempuan bisa tampil untuk menjadi seorang pemimpin?
2. Dalam UU No. 10 tahun 2008 pada pasal 8 bagian D, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyangkut, menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik, apa ini juga berlaku bagi perempuan dalam kepemimpinan nagari? (di sertakan alasan)
3. Salah satu hambatan yang dimiliki perempuan dalam kepemimpinan salah satunya hambatan historis, yang menyangkut kurangnya nama perempuan dalam sejarah, apakah menurut bapak ini masih berpengaruh sampai saat sekarang ini terhadap kepemimpinan perempuan di nagari?
4. Kalau dilihat tiap-tiap periode sebelumnya, kepengurusan di nagari seperti di KAN, BAMUS, apakah ada tokoh perempuan? (Jika ada apa alasannya, jika tidak, apa pula alasannya)
5. Apakah ada timbulnya pro dan kontra setiap tampilnya perempuan dalam kepemimpinan di nagari? Kalau ada, upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasinya?

B. Pertanyaan untuk Ketua PKK dan Bundo Kanduang

1. Bagaimana menurut pendapat ibuk, tampilnya perempuan sebagai pemimpin di Nagari? Dan apa saja yang menjadi peluang bagi perempuan untuk bisa tampil menjadi seorang pemimpin di nagari?
2. Seperti yang terlihat pada struktur organisasi KAN dan BAMUS, hanya ada satu orang perempuan yang berperan disini, menurut ibuk, apakah yang menjadi kelemahan bagi perempuan sehingga minimnya kepemimpinannya disini? Padahal sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 bahwa warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

3. Dalam kepemimpinannya, tentu perempuan juga memiliki kelebihan-kelebihan. Menurut ibuk, apa saja yang mejadi nilai-nilai positif terhadap kepemimpinan perempuan?
4. Menurut pandangan agama dan adat, apakah perempuan kurang pantas menjadi seorang pemimpin? Bagaimana menurut pandangan ibuk?
5. Dalam konvensi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyangkut penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, bagaimana pandangan dan pendapat ibuk tentang konvensi ini?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL



Jln. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Phone 7055671

Nomor : 3021/UN35.1.6/PG/2011
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Padang, 18 Juli 2011

Yth. Bupati Agam
c.q. Kepala Kantor Kesbangpol dan Limnas
Kabupaten Agam
di
Lubuk Basung

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan Skripsi/TA mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Nama : Zelfira Julita
BP / NIM : 2007 / 89300
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jenjang Program : S1

bahwa yang bersangkutan bermaksud melakukan penelitian pada Kantor Walinagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Dengan Judul : Peluang Dan Hambatan Perempuan Dalam Kepemimpinan Nagari (Studi : Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya).

Lama Penelitian : ± 3 bulan

Sehubungan dengan itu mohon kiranya Saudara dapat membantu dan memberi izin untuk kegiatan dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan :
- Ketua jurusan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Veteran No 1. Telp./Fax. 0752 - 66354 , Padang Baru - Lubuk Basung, Kode Pos. 26415
http://www.agamkab.go.id E-mail : yantu@agamkab.go.id Sms Center 08126612111

REKOMENDASI

Nomor : B.070/313 /KPT-Ag/2011

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Nomor: 3021/UN35.1.6/PG/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/ riset/ penelitian/ observasi/ Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama : ZELFIRA JULITA
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 12 Juli 1988
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Komp. Parupuk Raya C.44 Tabiang, Padang
Nomor Kartu Identitas : NIM. 89300
Judul Penelitian : Peluang dan Hambatan Perempuan dalam Kepemimpinan Nagari
(Studi : Kenagarian Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya).
Lokasi Penelitian : Kantor Wali Nagari Koto Gadang Kecamatan Tanjung Raya
Waktu Penelitian : 27 Juli s/d 27 September 2011
Anggota Penelitian : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Izin Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Lubuk Basung, 25 Juli 2011

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU,

FATIMAH, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang di Padang;
3. Camat Tanjung Raya di tempat;
4. Wali Nagari Koto Gadang di tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA

Alamat : Jalan Tolago Biru, Maninjau

Telp/Fax : 0752-61622

REKOMENDASI

Nomor.B.070/274.VII/Pem/2011

TENTANG

IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN/OBSERVASI

Kami Bupati Agam setelah mempelajari dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Nomor : B.070/313/KPT-Ag/2011, tanggal 25 Juli 2011, perihal Izin Pelaksanaan Riset/ Observasi, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Research/ Survey di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

1. Nama : ZELFIRA JULITA
Tempat/Tanggal Lahir : Pekan Baru / 12 Juli 1988
Alamat : Komp. Parupuk Raya C.44 Tabiang, Padang
NPM : NIM.89300
Judul Penelitian : " *Peluang dan Hambatan Perempuan dalam Kepemimpinan Nagari (Studi : Kenagarian Koto Gadang Kec. Tanjung Raya. "*
Lokasi Penelitian : Kantor Walingagari Koto Gadang Kec. Tanjung Raya
Waktu Penelitian : 27 Juli s/d 27 September 2011
Anggota Penelitian : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian / Observasi
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian / Observasi yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah / Wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adapt dan kebijakan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq.Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Agam dan Camat / Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan Rekomendasi Izin Penelitian / Observasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Maninjau, 26 Juli 2011



Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat di Padang
2. Bupati Agam Cq. Kakan Kesbang dan Linmas Kab. Agam di Lubuk Basung
3. Muspida Kabupaten Agam di Lubuk Basung
4. Ka. BPKD Cq. Bidang Pendapatan
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA
WALI NAGARI KOTO GADANG VI KOTO

Alamat : Simp.Gantiang Koto Gadang - Telp. :

SURAT IZIN PENELITIAN

NO: 400 /37 /VII-2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Walinagari Koto Gadang VI Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Zelfira Julita
NIM : 2007/89300
Tempat tgl Lahir : Pekan Baru, 12 Juli 1988
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. Parupuk Raya C. 44 Tabiang, Padang
Lembaga Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
Judul Skripsi : Peluang dan hambatan perempuan dalam kepemimpinan nagari
(studi: Kenegarian Koto Gadang VI Koto Kec Tanjung Raya)
Waktu Penelitian : 27 Juli s/d 27 September 2011

Memberikan izin untuk melakukan penelitian di Nagari Koto Gadang VI Koto sesuai Judul yang diajukan. Kepada yang bersangkutan diharapkan agar dapat melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah surat izin penelitian ini kami berikan untuk dapat di pergunakan sebaik-baiknya.





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA

WALI NAGARI KOTO GADANG VI KOTO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400 / 325 / XI-2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Walinagri Kopto Gadang VI Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan ini menerangkan :

Nama : **ZELFIRA JULITA**
Tempat / Tgl Lahir : Pekan Baru / 12 Juli 1988
BP / Nim : 2007 / 89300
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Komp Parupuk Raya C / 44 Tabiang Patang
Judul Skripsi : Peluang dan Hambatan Perempuan dalam Kepemimpinan di Nagari
Waktu Penelian : 27 Juli s/d 27 Oktober 2011

Bahwa namanya yang tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian di Nagari Koto Gadang VI Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

